

**REKRUTMEN BAKAL CALON LEGISLATIF PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA DPW SUMATERA BARATDALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

***RECRUITMENT OF PROPOSAL CANDIDATES FOR THE INDONESIAN
SOLIDARITY PARTY DPW WEST SUMATRA IN THE 2019 GENERAL
ELECTIONS***

Heby Hara Octabrian¹, Indah Adi Putri²
Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas
Octabrian.heby@gmail.com

ABSTRAK:Partai politik memiliki salah satu fungsinya yakni rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara, karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan menjalankan perannya dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini partai politik memiliki tanggung jawab terhadap rekrutmen figur-figur pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena itu sebuah negara demokrasi mensyaratkan keterlibatan partai politik dalam suksesi kepemimpinan nasional. Maka sistem perekrutan calon-calon pemimpin (pejabat politik) yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Fenomena yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) khususnya DPW Sumatera Barat ini menjadi menarik untuk diteliti, karena sebagai partai baru mampu untuk mendaftarkan kader-kadernya dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019, bahkan mampu untuk memenuhi kuota 100 persen dan ini melalui proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai ini, sebagai partai politik baru tentunya hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat dan menjelaskan bagaimana proses rekrutmennya sehingga bisa mendapatkan hasil seperti demikian. Sebagai sebuah partai politik baru, tentunya PSI juga melakukan proses rekrutmen politik untuk mencari kader-kadernya yang potensial baik secara kualitas maupun kuantitas untuk didistribusikan ke jabatan-jabatan politik di pusat maupun di daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori rekrutmen politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PSI Sumbar dimana mendaftarkan 655 orang yang diantaranya 65 orang untuk DPRD tingkat Provinsi dan 590 untuk DPRD tingkat kabupaten/kota. Khusus untuk DPW PSI Sumbar dari 65 orang bacaleg yang didaftarkan 57 orang dan 8 orang sisanya tidak lolos hal ini pun disebabkan oleh persoalan administratif dan untuk anggota terpilih tidak ada satupun yang menduduki jabatan legislatif di DPRD tingkat Provinsi. Fenomena ini membuat menarik peneliti untuk menjelaskan lebih dalam lagi secara komprehensif bagaimana sebenarnya proses rekrutmen dari bakal calon legislatif tersebut.

Kata Kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Calon Legislatif.

ABSTRACT : *One of the functions of political parties is political recruitment. Political recruitment is a strong foundation in building a country's political system, because this process will produce individuals who will carry out their roles in running state institutions. In this context, political parties are responsible for the recruitment of qualified leaders who are in accordance with the aspirations of the people. Therefore, a*

democracy requires the involvement of political parties in the succession of national leadership. So the system of recruiting prospective leaders (political officials) carried out by a political party determines the quality of a country's leadership. The phenomenon that occurred in the Indonesian Solidarity Party (PSI), especially the West Sumatran DPW, is interesting to study, because as a new party it is able to register its cadres in the 2019 legislative elections, even being able to meet the 100 percent quota and this is through a political recruitment process. what this party does, as a new political party, of course, this makes researchers interested in seeing and explaining how the recruitment process is so that they can get such results. As a new political party, of course PSI also carries out a political recruitment process to find potential cadres both in quality and quantity to be distributed to political positions at the center and in the regions. In this study, the researcher used Pippa Norris' political recruitment theory. This study used a qualitative approach with descriptive research type. The recruitment process carried out by the West Sumatra PSI DPW registered 655 people, of which 65 were for the Provincial DPRD and 590 for the Regency/City DPRD. Especially for the West Sumatra PSI DPW of the 65 legislative candidates registered, 57 people and the remaining 8 people did not pass; this was also due to administrative problems and for the elected members none of them held legislative positions in the Provincial DPRD. This phenomenon makes it interesting for researchers to explain more comprehensively how the actual recruitment process of the prospective legislative candidates is.

Keywords: *Political Parties, Political Recruitment, Legislative Candidates.*

A. PENDAHULUAN

Rekrutmen politik menjadi landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara, karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan menjalankan perannya dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini partai politik memiliki tanggung jawab terhadap rekrutmen figur-figur pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena itu sebuah negara demokrasi mensyaratkan keterlibatan partai politik dalam suksesi kepemimpinan nasional. Maka sistem perekrutan calon-calon pemimpin (pejabat politik) yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.⁵ Rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa di pundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan.⁶ Proses seleksi calon adalah salah satu hal pertama yang harus dilakukan partai politik sebelum pemilihan umum berlangsung. Mereka yang akhirnya terpilih menjadi calon yang berhasil yang telah diseleksi sebelumnya oleh partai, dan mereka adalah orang-orang yang akan menentukan bagaimana profil dan kinerja partai. Artinya, hasil dari proses seleksi calon akan mempengaruhi partai setelah pemilihan umum itu sendiri berakhir.

Proses rekrutmen politik sangatlah penting dan menentukan kearah mana partai politik ini akan dibawa. Berbagai persoalan atau permasalahan yang melanda partai politik bermula dari perekrutannya, apabila kualitas dari kader itu bagus, diproses secara bagus maka bisa dikatakan menghasilkan kader yang bagus pula, begitu juga sebaliknya. Namun ada juga kualitas dari kader itu bagus hanya saja diproses dengan tidak bagus, tentu outputnya tidak bagus juga, begitu juga sebaliknya. Hal ini pun juga menjadi salah satu penyebab awalnya masalah bagi partai politik yang dinamis dan kompleks. Ini semua tergantung bagaimana partai politik mengolah serta melatih kader itu sendiri sehingga sesuai dengan ideologi atau tujuan dari partai itu sendiri. Rekrutmen partai politik adalah awal dari keberlangsungan partai politik karena dalam proses perekrutan sangat menentukan, ini tergantung dari kader parpol yang menjadi penggerak mesin partai politik itu sendiri. Fenomena rekrutmen ini sangat dinamis dan kompleks mengikuti tren politik serta perkembangan zaman, hal ini pun berdampak kepada partai politik bagaimana cara mereka untuk melakukan perekrutan atau pencarian kader-kader baru untuk diajak masuk ke dalam partai politik.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa peran partai politik begitu sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik mampu menjadi penghubung antara negara (*state*) dan warga negara (*the citizens*) dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Mekanisme perekrutan oleh partai politik kepada masyarakat yang ingin masuk kedalam jajaran elite negara dan itu pun menjadi salah satu fungsi dari partai politik untuk mencari kader-kadernya yang akan didistribusikan ke jabatan-jabatan politik. Walaupun kedudukan dari partai politik itu sudah cukup penting, namun sayangnya, peran dari partai politik masih jauh dari kata ideal, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh partai politik di negeri ini adalah realitas belum melembaganya partai politik sebagai institusi sekaligus agen utama sistem demokrasi.

Negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi tentunya berimplikasi pada fungsi partai politik, yang mana menurut Miriam Budiarto, terdapat empat fungsi partai politik yakni, sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengatur konflik, dan sarana rekrutmen politik. Dalam fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan rekrutmen politik. Menurut Jack C. Plano berpendapat, bahwa rekrutmen merupakan sebuah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian rekrutmen politik mengacu pada pengisian posisi formal dan legal, untuk melakukan hal tersebut adanya agen tertentu baik formal maupun informal.

Selanjutnya, proses rekrutmen ini dilakukan dengan dua cara yang bersifat terbuka dan tertutup. Rekrutmen yang dilakukan dengan cara terbuka maksudnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kemudian, rekrutmen yang dilakukan secara tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, dan lainnya.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk dapat menjelaskan fenomena yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik menentukan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah yang termasuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria tersebut adalah :

1. Informan merupakan pengurus partai
2. Informan adalah orang yang bertugas dalam bagian rekrutmen politik di DPW Sumatera Barat
3. Informan adalah yang menjadi tim seleksi bakal calon legislative

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen bakal calon legislatif DPW PSI Sumatera Barat

1. Kandidat bakal calon legislatif (*Candidacy*)

PSI yang merupakan partainya anak muda juga mencoba mendorong anak-anak muda untuk terjun ke dunia politik, DPW PSI Sumatera Barat dalam pendaftaran bakal calon legislatif, banyak yang mendaftar menjadi bakal calon yang masih berusia di bawah 40 tahun, bahkan belum pernah menjadi anggota partai politik pun tidak menjadi persoalan karena itu tidak menjadi hal yang utama, yang penting dari itu semua niat awal untuk menjadi anggota legislatif. Dan dalam proses seleksi untuk bakal calon legislatif ini, bagi kader partai yang ikut mendaftar menjadi calon legislatif itu nantinya ada porsi lebih yang diberikan terkait dengan penilaian yang diberikan (diberikan nilai lebih) dibandingkan dengan yang bukan kader partai namun ikut mendaftarkan diri di PSI menjadi bakal calon legislatif. Dengan adanya orang baru diharapkan mempunyai gagasan baru, warna politik baru dalam kontestasi pemilihan umum yang akan memberikan alternatif opsi kepada pemilih nantinya. Namun disisi lain peneliti melihat pada pelaksanaan dari tahapan-tahapan proses rekrutmen dari bakal calon legislatif DPW PSI Sumatera Barat ini tidak maksimal hal ini diakui oleh Yosmeri Yusuf yang pada wawancara yang dilakukan memang untuk pelaksanaan tidak seideal yang diharapkan.

2. Tim seleksi bakal calon legislatif (*Selectorate*)

PSI sebagai sebuah partai baru melibatkan pihak eksternal partai seperti tokoh masyarakat, akademis dan lain-lain dalam proses penyeleksian dari bakal calon legislatif agar supaya mampu menyeleksi dan objektif serta profesional dalam menilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh tim seleksi untuk menjadi calon legislatif yang akan bertarung di pemilihan umum 2019 karena dari awal PSI melakukan proses rekrutmen ini secara terbuka dan transparan namun profesional dalam pelaksanaannya, hal ini yang cukup berbeda dengan yang dilakukan oleh partai-partai politik lainnya yang lebih terkesan tertutup dan eksklusif mekanismenya. Namun beberapa temuan menjelaskan bahwa tim seleksi yang disusun oleh DPW PSI Sumatera Barat dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif khususnya dari eksternal partai yang dalam hal ini merupakan orang di luar partai, faktanya merupakan bagian

dari internal partai juga seperti Yosmeri Yusuf yang merupakan ketua Dewan Pembina DPW PSI Sumatera Barat dan Marhadi Efendi yang ikut juga mendatarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dapil 4.

3. Peran DPW dalam proses rekrutmen

Para bakal calon yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi untuk dijadikan calon legislatif nantinya diberikan tugas dan tanggung jawab sama dengan calon lainnya atas terbentuknya sumber daya manusia (SDM) partai yang tangguh dan unggul sesuai dengan kompetensi kader itu sendiri, sehingga akan lebih optimal dalam menjalankan misi partai ditengah masyarakat. Para calon yang sudah lolos mempunyai tugas untuk membangun citra yang positif di mata masyarakat. Untuk mengaktualisasikan secara berkesinambungan dan terus menerus. Adapun tanggung jawab yang diberikan DPW PSI Sumatera Barat kepada calon legislatif adalah membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, calon legislatif harus mendapatkan ruangkeuasaan, dalam konteks positif, supaya partai bisa berbuat lebih nyata lagi. Proses penyeleksian ini untuk DPW Sumatera Barat pada pemilihan umum tahun 2019 memang terlaksana hanya saja tidak maksimal dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang, pengurus DPW hanya diisi oleh 7 orang saja.

4. Mekanisme kandidat diputuskan

DPW PSI Sumatera Barat berusaha untuk bersikap adil dalam pengambilan nomor urut calon legislatif, hal ini dibuktikan dengan ada sistem cabut lot atau undian yang memang dilakukan secara terbuka. Proses penyeleksian yang dilakukan oleh pihak internal terhadap bakal calon legislatif pada bagian administratif dari bakal calon legislatif tersebut dan pihak eksternal melakukan proses seleksi pada bagian uji kompetensi dan kelayakan dari bakal calon legislatif tersebut.

A. Tahap Sertifikasi

1) Persyaratan legal pencalonan

Peneliti melihat bahwa untuk persyaratan untuk pencalonan ini hanya bersifat formalitas saja yang sesuai pada umumnya, hanya saja disini DPW PSI Sumatera Barat mencoba sistem yang berupaya mendorong kaum muda untuk terjun dalam politik secara aktif, terlihat memang fokusnya ke arah sana terlihat dari mulai kepengurusan partai yang didominasi anak muda begitupun dengan bakal calon legislatif hal ini juga sesuai branding partai anak muda yang memang dibangun sejak awal berdirinya partai ini.

Disisi lain peneliti melihat bahwa memang terdapat beberapa kekurangan terkait dengan minimnya pengalaman dari mulai pengurus dan bakal calon legislatif dari partai ini yang memang pemilihan umum ini dijadikan sebagai arena tarung politik yang memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pengalaman juga menjadi faktor penting dalam pertarungan secara elektoral. Dan juga ditambah dengan waktu yang memang sempit sehingga proses rekrutmen menjadi tidak ideal dan tergesa-gesa mengingat mepet nya waktu mulai dari awal perekrutan, agenda partai, kampanye, dan lain-lain sampai pada waktu pemilihan umum.

2) Sistem Pemilu dan Hukum

DPW PSI Sumatera Barat menjadi aturan perundang-undangan tersebut sebagai landasan hukum dalam menjalankan mekanisme perekrutan dari bakal calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019, walaupun memang dalam pelaksanaannya memang diakui oleh tim seleksi bakal calon legislatif pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti jauh dari semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan baik secara internal maupun eksternal.

3) Norma informal dan nilai budaya

Adanya norma dan nilai yang ditanamkan kepada pengurus dan bakal calon legislatif seperti anti korupsi, toleransi serta keberagaman dalam setiap individu kader sehingga hal ini secara otomatis menjadi budaya ataupun karakter dari setiap kader partai. Memang dari awal pembentukan dan berdirinya partai ini, peneliti melihat komitmen ini yang coba untuk dibangun dan ditanamkan. Hanya saja tentu pelaksanaan dari mekanisme perekrutan ini yang menjadi masalah ataupun kendala seperti untuk secara administratif para bacaleg diminta untuk menulis esai terkait dengan anti korupsi, toleransi dll, yang memang diakui oleh pengurus partai itu tidak berjalan dengan semestinya. Ini menjadi menarik perhatian peneliti untuk menggali lebih dalam terkait dengan mekanisme perekrutan dan bakal calon legislatif karena terkesan dari segi konsep dan penyusunan sistem rekrutmen dan seleksi sangat bagus, namun pada prakteknya ini tidak berjalan dengan maksimal.

B. Tahap Penominasian

1. Prosedur nominasi kandidat

Dalam tahapan ini proses penominasian dilakukan secara lotting artinya dengan melakukan istilah cabut lot dalam penentuan nomor urut kandidat. namun peneliti melihat sesuatu yang janggal dari daftar calon legislatif tetap yang telah di verifikasi oleh KPU karena semua pengurus partai yang ikut mencalonkan diri berada di nomor urut 1 di setiap dapil mereka, seperti Medo Fernando (Dapil 1) dan Sepris Yunaldi (Dapil 8) untuk pemilihan anggota DPRD Tingkat Provinsi. Apakah memang ada penyetingan atau hanya kebetulan saja.

2. Standar dari penyeleksi partai

Standar penyeleksi partai sesuai hasil dari tim penyeleksi bakal calon legislatif DPW PSI Sumatera Barat. Proses seleksi dilakukan oleh tim seleksi dengan melihat pada dipenuhinya persyaratan secara administratif dan uji kelayakan seperti wawancara yang digabungkan dengan memberikan bobot nilai atau standar yang diharapkan oleh partai. Ketersediaan kandidat

3. Ketersediaan kandidat

Dalam hal ketersediaan respon maupun antusiasme dari para bakal calon kandidat, DPW PSI Sumatera Barat menyampaikan bahwa memang ini menjadi suatu pencapaian yang diperoleh PSI khususnya DPW Sumatera Barat. Dengan bradingan sebagai partai baru, kemudian partai anak muda, partai mendapatkan perhatian terlepas dari berbagai macam kontrofersialnya namun memang diakui bahwa partai mendapatkan perhatian di public sehingga membuat setiap orang tertarik secara politik untuk bergabung.

4. Kandidat independen tanpa penominsian partai apapun

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap rekrutmen bakal calon legislatif DPW PSI Sumatera Barat terkait dengan kandidat independen itu tidak ada, dalam pemilihan calon legislatif ini mengharuskan partai politik untuk mendaftarkan calonnya melalui partai politik yang telah sah dinyatakan oleh penyelenggara pemilu sebagai peserta pemilu yang memang diaturoleh undang-undang dan peraturan lainnya.

5. Kumpulan kandidat yang dinominasikan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelum dari kumpulan kandidat yang telah mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dari DPW PSI Sumatera Barat yang berdasarkan lotting tadi dimasukkan ke prosedur nominasi kandidat terkait dengan nomor urut bisa disimpulkan bahwa proses ini dilakukan secara transparan, terbuka dan professional dan setelah melalui tahapan-tahapan tersebut para bacaleg ini diberikan pembekalan terkait dengan tugas dan fungsi dari legislatif ini dengan menghadirkan orang-orang yang ahli di bidangnya.

6. Permintaan oleh pemilih (akseptabilitas calon)

Dari terpenuhinya kuota setiap dapil tentu calon ini diibaratkan sebagai sebuah produk politik dan menjadi opsi pilihan bagi pemilih untuk siapa kandidat yang akan mereka pilih. Partai hanya berusaha memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, diserahkan kepada publik.

7. Permintaan oleh media massa pendukung finansial pembacuplainnya (Pemanfaatan media baru)

Dalam hal ini perkembangan teknologi yang sangat berkembang, ini memberikan opsi lainnya terhadap bagaimana partai memperkenalkan dirinya kepada publik. Penggunaan sosial menjadi salah satu platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan kampanyenya, terlebih lagi dengan isinya kepengurusan banyak dari kalangan muda yang melek juga akan teknologi PSI khususnya DPW Sumatera Barat menggunakan juga media sosial sebagai wadah partai ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan politiknya.

D. Tahap Pemilihan Umum

1) Anggota yang Terpilih

Dalam pemilihan umum tahun 2019 pada hasilnya tidak ada satupun yang terpilih dikarenakan adanya isu black campaign seperti isu ras, agama serta isu-isu negatif yang terjadi di pusat yang berdampak ke daerah khususnya DPW PSI Sumatera Barat. perhatian di public sehingga membuat setiap orang tertarik secara politik untuk bergabung.

2) Kandidat independen tanpa penominsian partai apapun

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap rekrutmen bakal calon legislatif DPW PSI Sumatera Barat terkait dengan kandidat independen itu tidak ada, dalam pemilihan calon legislatif ini mengharuskan partai politik untuk mendaftarkan calonnya melalui partai politik yang telah sah dinyatakan oleh penyelenggara pemilu sebagai peserta pemilu yang memang diaturoleh undang-undang dan peraturan lainnya.

3) Kumpulan kandidat yang dinominasikan

Sebagaimana yang dijelaskan sebelum dari kumpulan kandidat yang telah mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dari DPW PSI Sumatera Barat yang berdasarkan lotting tadi dimasukkan ke prosedur nominasi kandidat terkait dengan nomor urut bisa disimpulkan bahwa proses ini dilakukan secara transparan, terbuka dan professional dan setelah melalui tahapan-tahapan tersebut para bacaleg ini diberikan pembekalan terkait dengan tugas dan fungsi dari legislatif ini dengan menghadirkan orang-orang yang ahli di bidangnya.

4) Permintaan oleh pemilih (akseptabilitas calon)

Dari terpenuhinya kuota setiap dapil tentu calon ini diibaratkan sebagai sebuah produk politik dan menjadi opsi pilihan bagi pemilih untuksiapa kandidat yang akan mereka pilih. Partai hanya berusaha memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat, diserahkan kepada publik.

5) Permintaan oleh media massa pendukung finansial pembedukup lainnya (Pemanfaatan media baru)

Dalam hal ini perkembangan teknologi yang sangat berkembang, ini memberikan opsi lainnya terhadap bagaimana partai memperkenalkan dirinya kepada publik. Penggunaan sosial menjadi salah satu platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan kampanyenya, terlebih lagi dengan isinya kepengurusan banyak dari kalangan muda yang melek juga akan teknologi PSI khususnya DPW Sumatera Barat menggunakan juga media sosial sebagai wadah partai ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan politiknya.

D. KESIMPULAN

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PSI Sumbar memang sudah bisa dikatakan baik, diatur secara profesional, transparan dengan melibatkan pihak eksternal sehingga memang dalam mekanismenya partai mencoba untuk memberikan sebuah pembaruan, hanya saja sebagai partai baru tentunya hal ini masih jauh dari kata sempurna, walaupun mekanismetau tahap-tahapan dari perekrutan bakal calon legislatif telah disusun secara sistematis dan baik, namun dalam pelaksanaannya masih tidak maksimal ini terlihat dari bagaimana partai tidak mampu menjalankan apa yang sudah diaturnya sendiri sedemikian rupa, masih banyak terdapat kekurangan dalam segi teknis dari pelaksanaan proses rekrutmen bakal calon

legislatif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bagia, Waluya. 2007. *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung : Purna Inves.*
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-dasar ilmu politik.* Gramedia pustaka utama. Bungin, B. 2001. *Metodologi penelitian sosial.*
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik di Era Demokrasi.* Yayasan Obor Indonesia
- Haris, S. 2014. *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Imansyah, T. 2012. Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3),*
- Katz, R. S., & Crotty, W. 2015. *Handbook partai politik.* Bandung: Nusamedia. Labolo, M., & Ilham, T. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.* Rajawali Pers.
- Lexy, J. M. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: RemajaRosdakarya..
- Maksudi, B. I. 2012. *Sistem politik Indonesia: pemahaman secara teoritik dan empirik.* RajaGrafindo Persada.
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik : Teori dan Praktik Di Indonesia.* Edisi Revisi. Yogyakarta. Institute for Democracy and Welfarism.
- Robert K. Yin. 2005. *Studi Kasus Design & Metode.* Jakarta. Rajawali Pers. Sabri, S., & Hasan, H. Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 2(3).*
- Sugiharto, U. S. U. Komite Nasional Indonesia Pusat (Knip) Sebuah Anomali Suprastruktur Negara Pada Tahun 1945. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 1(2), 78-87.*
- Surbakti, R. 1992. *Memahami ilmu politik.* Grasindo.

